

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGEMBANGKAN DAN MENGELOLA PARIWISATA DI DESA PUJON KIDUL KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG

Implementation Of Village Government Policies In Developing And Managing Tourism In Pujon Kidul Village Pujon District Malang Regency

Robertus Paskalis Geli
Witin¹
Ignatius Adiwidjaja^{1*}
Dody Setyawan¹
Agustinus Ghunu¹

¹Universitas Tribhuwana
Tunggadewi, Malang

*corresponding author:
ignatius.adiwidjaja17@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang tidak bias tentang kebijakan pemerintah daerah Pujon Kidul dalam mempromosikan dan mengawasi pariwisata. Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai bagian dari metodologi kualitatif deskriptif. Pengambilan sampel secara purposif digunakan untuk memilih empat informan secara total: sekretaris desa, kepala pariwisata, kepala Desa Pujon Kidul, dan pelaku usaha dari masyarakat. Model interaktif yang dikembangkan oleh Huberman, Miles, dan Sadana digunakan untuk melakukan analisis data, yang meliputi pengumpulan data, pemadatan data, penyajian data, dan pembuatan kesimpulan. Empat indikator utama teori George Edward III komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi juga digunakan dalam penelitian ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah desa untuk mempromosikan dan mengawasi pariwisata telah berjalan dengan baik dan sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan. Pemerintah, beberapa masyarakat, dan pekerja industri pariwisata mendukung pelaksanaan kebijakan ini, demikian pula ketersediaan dana dan sumber daya yang cukup. Namun kendala yang ada antara lain minimnya fasilitas dan adanya penentangan dari beberapa kelompok terhadap pendirian Kafe Sawah.

Kata Kunci:

Implementasi kebijakan
Pariwisata
Pujon Kidul

Keywords:

Policy implementation
Tourism
Pujon Kidul

Abstract

The purpose of this study was to collect unbiased data and information about Pujon Kidul's local government policy in promoting and supervising tourism. Data collection for this study used observation, interview, and documentation methods as part of a descriptive qualitative methodology. We used purposive sampling to select four informants in total: the village secretary, the head of tourism, the head of Pujon Kidul Village, and business actors from the community. Huberman, Miles, and Sadana developed the interactive model to conduct data analysis, encompassing data collection, data condensation, data presentation, and conclusion drawing. This study also utilized the four main indicators of George Edward III's theory of communication, resources, bureaucratic structure, and disposition. The study's findings indicate that the village government's strategy to promote and supervise tourism has been successful and consistent with the established plan. The government, some communities, and tourism industry workers support the implementation of this policy, as well as the availability of sufficient funds and resources. However, there are existing obstacles, including a lack of facilities and opposition from several groups to the establishment of the rice field cafe.



© year The Authors. Published by Penerbit Forind. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Link: <https://jadment.forindpress.com/index.php/jadment/index>

Submit: 04-11-2024

Accepted: 22-11-2024

Published: 25-11-2024

PENDAHULUAN

Dusun yang dikenal sebagai "Dusun Wisata" memiliki sumber daya alam yang melimpah, sehingga menguntungkan bagi perekonomian setempat dan mudah diatur. Sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan ekonomi desa semuanya dianggap

sebagai bagian dari potensi desa, yang digunakan untuk memajukan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Pengembangan pariwisata di desa atau potensi desa yang dijadikan destinasi wisata memerlukan perencanaan yang baik, investasi, dukungan pemerintah, serta keterlibatan aktif seluruh Masyarakat

di desa. Selain itu, upaya untuk mempromosikan destinasi wisata di desa sangat penting agar potensi ekonomi dan sosial serta rencana Pembangunan desa berkelanjutan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, terdapat Pujon Kidul, salah satu desa dengan luas wilayah 323.159 hektar, 1.224 rumah, dan 4.279 jiwa. Bertani, bercocok tanam, beternak, perikanan, buruh bangunan, berdagang, dan sebagainya merupakan kegiatan sehari-hari masyarakat setempat. Mengingat luas wilayah Desa Pujon Kidul sekitar 65% dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat, maka sektor pertanian dan peternakan selama ini mendominasi kegiatan ekonomi di dusun tersebut.

Desa Pujon Kidul memiliki potensi yang luar biasa sebagai destinasi wisata. Banyak wisatawan dari dalam maupun luar kota yang berkunjung ke sejumlah lokasi wisata. Desa Pujon Kidul memiliki hamparan sawah yang luas karena tanahnya yang subur. Hal ini memberikan peluang yang sangat besar bagi warganya untuk mengembangkan potensinya, khususnya dalam hal pengembangan objek wisata desa sesuai dengan visi dan misi desa. Potensi tersebut dimanfaatkan untuk mencapai kinerja yang optimal, khususnya di bidang pariwisata dan pertanian. Semua individu, terutama warga Desa Pujon Kidul, memperoleh manfaat dari kedua lahan tersebut dengan cara mereka sendiri yang unik.

Strategi Pemerintah Desa Pujon Kidul dalam hal pendirian destinasi wisata, badan usaha, dan usaha-usaha lain yang terkait dengan pariwisata dipaparkan dalam tulisan ini. Kebijakan ini terutama bertujuan untuk menjamin terlaksananya pengelolaan pariwisata secara teratur, termasuk kewajiban dan hak-hak pengelola usaha pariwisata desa serta peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh para pelaku usaha. Kebijakan ini lahir sebagai respon terhadap berbagai permasalahan yang kerap muncul di masyarakat, khususnya perselisihan

yang kerap terjadi dan komunikasi yang kurang efektif antara Pemerintah Desa dengan warganya. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memaksimalkan potensi desa dan menciptakan ketertiban dalam pengelolaan pariwisata agar tidak merugikan masyarakat. Dengan memanfaatkan sumber daya desa, program ini diharapkan dapat membantu upaya penguatan perekonomian negara.

Industri pariwisata Desa Pujon Kidul mendukung sejumlah inisiatif bisnis dengan menjadi wadah bagi kemampuan masyarakat untuk mengelola potensinya secara kreatif. Banyak inisiatif terkait pariwisata yang akan memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan produktivitas masyarakat serta konsekuensi positif lainnya bagi perekonomian desa. Fondasi pertumbuhan berkelanjutan akan menjadi keterlibatan dan dukungan masyarakat terhadap usaha-usaha terkait pariwisata ini. Kafe sawah dan fasilitas pendidikan pertanian merupakan dua keunggulan Desa Pujon Kidul. Kafe sawah tidak beroperasi dengan lancar dan baik saat pertama kali dibuka. Namun, Desa Pujon Kidul mulai dikenal sebagai salah satu tujuan wisata populer pada tahun 2017 baik di dalam maupun luar kota, seiring berjalannya waktu. Pendapatan bersih kafe sawah bahkan melampaui Rp 1 juta pada tahun 2017. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam pengembangan wisata ini berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas mereka, yang hanya merupakan salah satu dari beberapa masalah dalam industri ini (Hadi, et, al., 2023).

Pertumbuhan industri pariwisata di Desa Pujon Kidul mendukung sejumlah inisiatif bisnis dengan menjadi wadah kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Berdirinya berbagai usaha pariwisata diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi perekonomian desa, termasuk peningkatan produksi yang signifikan. Agar pertumbuhan Desa Pujon

Kidul dapat berkelanjutan, masyarakat harus berperan aktif dan mendukung program usaha pariwisata.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Kebijakan

Kebijakan, atau frasa "*policy*," adalah salah satu yang sering digunakan dalam bahasa Inggris. Kata "*policy*" berasal dari bahasa Latin, Yunani, dan Sansekerta. *Policie* dalam bahasa Inggris Kuno, yang mengacu pada penyelesaian masalah administratif atau publik, berasal dari akar kata polis (negara kota) dan pur (kota) dalam bahasa Yunani dan Sansekerta (Dunn, 2003:51). Akhirnya, muncullah politia (negara). Kebijakan digambarkan sebagai seperangkat gagasan dan ajaran yang berfungsi sebagai kerangka kerja dan landasan bagi suatu rencana yang membahas kepemimpinan, cara melaksanakan tugas, dan cara berperilaku untuk mencapai tujuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai seperangkat kegiatan atau tindakan yang disarankan oleh individu, organisasi, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu di mana terdapat kemungkinan dan tantangan untuk menerapkan kebijakan yang disarankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Keban (2014:59), kebijakan merupakan hasil dari pemeriksaan menyeluruh terhadap beberapa pilihan, yang berpuncak pada penentuan pilihan yang optimal. Akan tetapi, kebijakan merupakan hipotesis dengan kondisi awal dan akhir yang telah ditentukan sebelumnya, menurut Widavsky (2012:17). Lebih jauh, hubungan antara entitas pemerintahan dan lingkungannya adalah apa yang disebut oleh Eyestone (2017 dalam Agustino, 2008) sebagai kebijakan publik. Tujuan kebijakan publik adalah untuk memfasilitasi realisasi aspirasi bersama. Dalam kasus bangsa Indonesia, kebijakan publik mencakup sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan cita-cita Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan) dan Undang-Undang Dasar

(Negara Kesatuan Republik Indonesia), yang didasarkan pada hukum dan bukan kekuasaan semata.

Implementasi

Secara etimologis, Wahab (2004:64) mengartikan implementasi berasal dari kata bahasa Inggris *to implement* yang berarti melaksanakan. Implementasi berarti melakukan suatu tindakan yang berdampak pada hal lain. Winarno dalam Juliarso (2018:16) menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah Implementasi kebijakan secara umum dipandang sebagai alat administrasi hukum yang melibatkan berbagai pelaku, kelompok, proses, dan metode yang berkolaborasi untuk melaksanakan kebijakan guna mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan.

Serangkaian tindakan yang diambil untuk memberikan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat menghasilkan konsekuensi yang diinginkan dikenal sebagai implementasi, menurut Afan (2009:295). Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2005) memberikan penjelasan tentang implementasi ini dengan menyatakan bahwa fokus implementasi kebijakan adalah pada peristiwa dan kegiatan yang mengikuti pengesahan pedoman kebijakan negara. Ini mencakup upaya administratif dan konsekuensi/dampak aktual pada masyarakat atau peristiwa. Ini membantu untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program dinyatakan valid atau dirumuskan.

Dari definisi di atas jelas terlihat bahwa implementasi kebijakan memerlukan setidaknya tiga langkah. Sasaran dan tujuan kebijakan didahulukan; diikuti oleh tindakan atau kegiatan yang bertujuan untuk mencapai sasaran; dan terakhir, hasil kegiatan. Proses implementasi kebijakan bersifat dinamis dan melibatkan pelaksana kebijakan yang melaksanakan tugas. Implementasi kebijakan harus diwujudkan dalam bentuk nyata selain bersifat teoritis. Suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika hanya diutarakan dan direncanakan tanpa ada upaya pemerintah untuk mewujudkannya. Widodo

(2010:97) mengutip pernyataan Edward III bahwa komunikasi kebijakan memiliki beberapa unsur, seperti transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

1. Dimensi transmisi (*Transmission*) memerlukan penyampaian kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada pelaksana kebijakan maupun kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak berkepentingan lainnya.
2. Dimensi Kejelasan (*Clarity*) menuntut agar kebijakan dikomunikasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dengan cara yang jelas dan mudah dipahami sehingga mereka menyadari tujuan, sasaran, dan substansi kebijakan publik serta mengetahui apa yang perlu dipersiapkan dan dilaksanakan agar kebijakan dapat berhasil secara efektif dan efisien.
3. Dimensi Konsistensi (*Consistency*) diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi tidak membingungkan audiens sasaran, pihak yang berkepentingan, atau pelaksana kebijakan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sedangkan alat utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (Sugiyono, 2018). Sebelum terjun ke lapangan, peneliti menyiapkan empat informan untuk penelitian: kepala desa, sekretaris desa, karyawan pariwisata, dan anggota masyarakat yang merupakan pelaku bisnis. Peneliti juga menyiapkan sejumlah panduan wawancara atau pertanyaan untuk lapangan. Tiga pendekatan kualitatif yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi diperlukan bagi peneliti untuk memastikan keabsahan data yang dikumpulkan. Tahap penelitian selanjutnya memerlukan dokumentasi dalam bentuk foto atau data lain untuk mendukung data yang dikumpulkan dari informan selama pendekatan wawancara. Langkah selanjutnya adalah observasi, yang melibatkan turun ke lapangan untuk menyaksikan secara

langsung apa yang sedang terjadi dan apakah sesuai atau tidak dengan keterangan informan.

Selanjutnya, peneliti menggunakan teknik uji kredibilitas, transferabilitas, ketergantungan, dan konfirmasi untuk menilai validitas data. Selain itu, peneliti memperpanjang periode penelitian, melakukan pengamatan lebih cermat, menganalisis data melalui studi kasus, dan melakukan uji referensi untuk memastikan data tersebut valid. Setelah semuanya selesai, peneliti mulai menyusun tesis menggunakan informasi yang dikumpulkan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Pariwisata

Dokumen pembahasan kebijakan pemerintahan desa pertama di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dalam Widodo (2010:96), George Edward III menyatakan bahwa para akademisi perlu berkonsentrasi pada empat bidang utama: disposisi, Struktur Birokrasi, Komunikasi, dan Sumber daya. Elemen-elemen ini diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan yang berhasil dan tepat waktu.

Komunikasi Kebijakan

Proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan dikenal dengan istilah komunikasi. Para pembuat kebijakan perlu mendapatkan informasi tentang kebijakan publik agar mereka mengetahui apa yang harus direncanakan dan dilakukan untuk implementasi kebijakan agar tujuan dan sasarannya dapat tercapai sesuai rencana. Penyampaian, konsistensi, dan kejelasan merupakan tiga topik utama yang dibahas Edward dalam proses komunikasi kebijakan (Edwards dalam Winarno, 2012:179) mendefinisikan penyampaian sebagai keyakinan para pelaksana bahwa suatu pilihan telah diambil dan perintah untuk melaksanakannya telah diberikan. Dalam hal ini, keterlibatan para pembuat keputusan sangat penting

dalam menginformasikan para pelaksana tentang pilihan yang telah diambil.

Mayoritas pelaksana pariwisata menyatakan tidak pernah terjadi pertentangan antara instruksi yang diberikan dengan instruksi yang diberikan oleh pengambil keputusan, berdasarkan hasil penelitian. Hal ini dikarenakan pengambil keputusan dan pelaksana peraturan desa memiliki saluran komunikasi yang fleksibel. Dalam hal ini, kejelasan menjadi penting karena hal ini menjaga bagaimana pariwisata tersampaikan kepada para pelaksana, yang merupakan pekerja di dinas pariwisata Desa Pujon Kidul. Keberhasilan kebijakan publik, menurut Edwards dalam Winarno (2012: 180), dipengaruhi oleh penerimaan para pelaksana terhadap kebijakan dan cara kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada mereka. Kebijakan publik dikomunikasikan kepada para pelaksana dengan cara yang meminimalkan ambiguitas dan ketidakjelasan makna, untuk mencegah kesalahpahaman terhadap suatu isu kebijakan publik oleh para pelaksananya.

Semua pelaksana dan pihak pelaksana yang ditunjuk untuk mengikuti pelatihan dikumpulkan secara resmi oleh pemerintah desa. Kami membahas satu per satu butir Peraturan Desa, dengan tujuan agar sesederhana mungkin. Agar pemahaman dapat terjaga dan tidak terkesan berat sebelah, komunikasi dua arah antara pelaksana dan perangkat desa tetap terjalin. Agar hasil yang diharapkan dapat tercapai, proses pemahaman tidak dilakukan sekaligus. Agar para pelaksana dapat memahami Peraturan Desa secara menyeluruh, diperlukan waktu untuk memahami prosedurnya. Pemerintah Desa Pujon Kidul menggunakan sejumlah taktik agar para pelaksana dapat memahaminya, tidak sekadar membiarkan hal-hal terjadi begitu saja.

Keseragaman arahan yang diberikan menjadi pokok bahasan dalam pembahasan masalah komunikasi berikut ini. Menurut Edward dalam Winarno (2012:180), arahan suatu kebijakan publik harus tepat, konsisten, dan tidak ambigu agar memudahkan para pelaksana dalam

melaksanakan tugasnya. Ketidakkonsistenan arahan yang diberikan akan mengakibatkan kebingungan. Hal ini mengakibatkan para pelaksana kebijakan akan memilih jalan yang menurutnya tepat daripada jalan yang terbaik. Para pekerja di organisasi pemerintahan desa maupun di industri pariwisata yang menduduki jabatan sebagai pelaksana operasional dan kepala bidang secara konsisten mendasarkan perintahnya pada prinsip ini. Lebih lanjut, untuk menjamin keseragaman perintah yang diberikan, para Kepala Bidang dan Pelaksana Operasional selalu melakukan koordinasi sebelum perintah dikeluarkan.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksana memahami hakikat peraturan daerah. Masyarakat yang melaksanakan Peraturan Desa menganggap bahwa Peraturan Desa merupakan seperangkat aturan yang harus dipatuhi dengan taat. Semua tata tertib yang telah ditetapkan sejak Peraturan Desa ini berlaku semakin harmonis dan konsisten satu sama lain, sehingga tidak terjadi inkonsistensi antar tata tertib. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, Pemerintah Desa Pujon Kidul telah melaksanakan dengan baik penyampaian kebijakan publik kepada tenaga pariwisata. Semua tenaga yang berkecimpung di bidang pariwisata mengetahui kebijakan tersebut dan telah mengikuti petunjuk pelaksanaannya. Komunikasi ini dibangun melalui sosialisasi kepada tenaga pariwisata secara berkala, termasuk pengurus inti dan pengurus di setiap unit pariwisata. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh pengurus dapat memahami kebijakan dan menerapkannya sesuai dengan peraturan pariwisata Desa Pujon Kidul. Selain itu, para pelaksana memahami hakikat peraturan desa dan memiliki pemahaman bersama tentang peraturan desa. Masyarakat yang melaksanakan Peraturan Desa meyakini bahwa Peraturan Desa merupakan seperangkat aturan yang harus dipatuhi dengan taat. Semua instruksi kini lebih berkesinambungan dan konsisten satu sama lain sejak peraturan daerah mulai berlaku, untuk mencegah terjadinya inkonsistensi antarperintah.



Gambar 1. Proses Komunikasi antara pemerintah desa dan para pegawai pengelola pariwisata

Temuan dokumentasi di atas memberikan penjelasan mengenai sosialisasi dan komunikasi positif yang terjalin antara Pemerintah Desa dengan personel terkait dalam pengelolaan pariwisata. Diasumsikan bahwa seseorang akan mengetahui aturan atau pedoman yang ditetapkan oleh para pelaku. Suatu kebijakan tidak akan terlaksana secara efektif meskipun didasarkan pada peraturan kebijakan jika para pelaku kebijakan atau pejabat pelaksana tidak memahami isi Peraturan Kebijakan Pariwisata.

Sumberdaya Kebijakan

Winarno (2012: 184) mengutip Edwards menyatakan bahwa kewenangan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mentransformasikan gagasan ke dalam bentuk tulisan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, serta personel yang kompeten dan memiliki kemampuan tugas yang kuat, merupakan sumber daya yang sangat penting bagi terlaksananya kebijakan publik. Pelaksanaan kebijakan publik tidak akan berjalan secara efektif tanpa adanya sumber daya tersebut.

Pelaksanaan kebijakan pariwisata di Desa Pujon Kidul didukung oleh kinerja yang baik dari masing-masing pegawai pariwisata sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Hal ini membuat pelayanan pariwisata dapat berjalan dengan lancar, karena keterampilan masing-masing pegawai dimanfaatkan dalam kinerjanya masing-

masing. Selain itu, dana dan fasilitas yang disediakan juga untuk memastikan tidak ada hambatan yang menghalangi seluruh pegawai pariwisata untuk bekerja dengan standar tertinggi.

No	Nama	Jabatan
1	Nurkholiq	Ketua
2	Muslimin	Wakil Ketua
3	Ali Mukhtar	Sekretaris
4	Ana Khusnul Masfufah	Anggota
5	Ahmad Soleh	Anggota

Gambar 2. Bagan Susunan Badan Permusyawaratan

Desa Pujon Kidul

Hasil kajian dan pengamatan terhadap sumber daya pengelolaan pariwisata baik dari segi kewenangan, sarana, dan anggaran menunjukkan bahwa sumber daya tersebut sudah sangat berkualitas. Desa wisata dapat mengelola kegiatan dan usaha dengan cukup baik berkat berbagai keunggulan tersebut. Namun, sumber daya manusia (SDM) masih menjadi kendala atau kekurangan bagi para pekerja di industri pariwisata. Penyelenggaraan pariwisata terdampak oleh rendahnya kualitas SDM pengelola. Pemerintah Desa Pujon Kidul masih berupaya memberikan pembekalan dan pelatihan kepada setiap pekerja pariwisata.

Disposisi Kebijakan

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:104), salah satu faktor kunci dalam efektivitas implementasi kebijakan adalah pola pikir atau sikap dari mereka yang melaksanakan kebijakan. Disposisi ini meliputi dorongan, kecenderungan, dan kecenderungan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan dengan penuh dedikasi agar tujuan kebijakan dapat tercapai seefektif mungkin. Fungsionalitas merupakan salah satu unsur kunci yang memengaruhi disposisi ini. Implementasi kebijakan dapat menemui kesulitan jika penanggung jawab gagal menyelesaikan tugas dengan cara yang memenuhi harapan pemangku kepentingan tingkat atas. Lebih jauh, pemberian insentif dipandang sebagai strategi yang berhasil untuk meningkatkan sikap para pelaksana kebijakan. Mereka lebih termotivasi untuk

mematuhi kebijakan yang sedang diberlakukan ketika mereka mendapatkan insentif.

Dukungan terhadap peraturan daerah dari para pelaksana kebijakan sangat penting dalam konteks pengelolaan pariwisata daerah Pujon Kidul. Temuan penelitian menunjukkan dukungan kuat yang dimiliki para pelaksana kebijakan terhadap peraturan pariwisata, sebagai konsekuensi dari keinginan mereka untuk menjamin bahwa pembangunan pariwisata berjalan sesuai dengan norma-norma yang ditetapkan dengan baik. Peraturan desa dianggap sebagai panduan yang secara tegas menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab guna mencegah duplikasi kekuasaan saat menjalankannya. Lebih jauh, karena setiap tindakan yang dilakukan didasarkan pada hukum yang tegas, keberadaan hukum tersebut memberikan rasa percaya diri bagi para pelaksana. Untuk memastikan keberhasilan kebijakan pariwisata di desa ini, komponen penting lain dari pengembangan pariwisata, seperti aksesibilitas, amenities, dan atraksi, juga menjadi prioritas utama.

Fasilitas dan aksesibilitas sangat penting untuk pengembangan objek wisata. Objek wisata ini berpotensi menarik lebih banyak pengunjung jika dikelola dengan baik dan efisien. Meskipun Sawah Café berpotensi menjadi destinasi wisata yang diminati, pengelolaan objek wisata belum dilakukan secara maksimal sehingga menyebabkan penyelenggaraan kegiatan pariwisata belum optimal. Menggali potensi objek wisata merupakan tahapan penting dalam pengembangan pariwisata.

Struktur Birokrasi

Mengenai organisasi yang mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan kesetaraannya, yang memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap lembaga. Baik sistem koordinasi maupun kerangka kelembagaan semakin efektif. Tidak ada tumpang tindih dalam pembagian, hak, dan tanggung jawab yang sah.

Pemerintah Desa Pujon Kidul kini memiliki kewenangan untuk pembinaan pariwisata. Struktur staf pariwisata telah dioptimalkan, menurut hasil pengamatan peneliti. Hal ini berarti bahwa semua tugas dan kewajiban pekerja pariwisata, termasuk tugas dan kewajiban administrator inti dan unit-unit yang mencakupnya, dapat ditugaskan sesuai dengan tuntutan masing-masing.

Meskipun setiap karyawan pariwisata di Desa Pujon Kidul telah dibagi ke dalam beberapa unit, namun masih terdapat kekurangan atau hambatan yang menyebabkan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Misalnya, setiap karyawan perlu mengembangkan wawasan yang lebih mendalam tentang pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata karena dalam menjalankan perannya masing-masing, mereka terkadang berkolaborasi dan saling membantu karena mereka menyadari bahwa masih ada rekan kerja yang memerlukan pelatihan lebih lanjut.

Faktor Penghambat

1. Faktor Penghambat Secara Komunikasi

Kendala utama dalam pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata di Desa Pujon Kidul adalah minimnya keterlibatan masyarakat dan minimnya sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan pariwisata. Perbedaan pendapat yang sering terjadi antara kepala desa dan penduduk juga membatasi partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan terkait pariwisata, sehingga menghambat kemungkinan pertumbuhan yang optimal.

2. Faktor Penghambat Secara Sumber Daya

Keterbatasan lahan menjadi salah satu kendala Desa Pujon Kidul dalam melaksanakan inisiatif pengembangan pariwisata. Hal ini mengakibatkan beberapa kendala, seperti minimnya lahan parkir bus pariwisata di Café Sawah. Keterbatasan ini membuat kegiatan pariwisata menjadi tidak lancar, mengurangi

kenyamanan pengunjung, bahkan dapat membuat kawasan tersebut kurang menarik.

3. Faktor Penghambat Secara Struktur Birokrasi

Meskipun setiap karyawan pariwisata terbagi dalam beberapa divisi, terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata Desa Pujon Kidul. Salah satu kendala utamanya adalah kurangnya pelatihan dan keahlian yang dimiliki oleh para staf, khususnya di bidang pengembangan pariwisata. Meskipun mereka saling bekerja sama dan membantu dalam menjalankan tugasnya, beberapa pekerja masih memerlukan pelatihan tambahan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi permasalahan di industri pariwisata dan mendorong pertumbuhan yang lebih efisien.

4. Faktor Penghambat Secara Disposisi

Meskipun mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah, pemerintah desa, petugas pariwisata, dan sebagian masyarakat, terdapat kendala dalam pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata di Desa Pujon Kidul dari anggota masyarakat yang tidak mendukung. Mereka beranggapan bahwa peningkatan pariwisata dapat menyebabkan persaingan dalam ekonomi lokal, yang akan mempersulit pelaksanaan sejumlah proyek dan program baru yang diperkenalkan.

KESIMPULAN

Di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, upaya pemerintah desa dalam mengembangkan pariwisata berjalan sesuai rencana. Misalnya, pemerintah desa secara rutin menyelenggarakan acara sosialisasi bagi para pekerja pariwisata, yang menunjukkan seberapa efektif informasi tentang kebijakan dikomunikasikan. Seperti yang terlihat dari fasilitas mewah yang ditawarkan dan fakta bahwa sebagian uang

wisatawan juga dialokasikan untuk desa dan industri itu sendiri, semua inisiatif pengembangan pariwisata mendapat manfaat dari sumber daya staf yang sangat baik dalam bentuk anggaran, fasilitas, dan kewenangan yang terkait dengan industri tersebut. Seluruh personil pariwisata di Desa Pujon Kidul memiliki etos kerja yang tinggi, yang membantu pemerintah desa dalam menjalankan kebijakan yang bertujuan untuk mengembangkan pariwisata dan memastikan bahwa program kerja terlaksana sebagaimana mestinya. Salah satu komponen kuncinya adalah dukungan penuh dari pemerintah. Keberlanjutan dan pertumbuhan industri pariwisata desa semakin didukung oleh pembangunan infrastruktur desa dan penyediaan fasilitas serta infrastruktur yang memadai.

REFERENSI

- Hadi, Wahyu Pramono, et al. 2023. Pengaruh Pengelolaan Sumber Daya Manusia Terhadap Kemajuan Optik. *Jurnal Mata Optik*, Vol. 4 No. 2.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Caps
- Widodo, Joko. 2016. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjadara University Press.
- Eyestone, Robert. 1971. *The Thread Of Policy, A Study In Policy Leadership*. Indianapolis: Bobbs-Merrill.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Yeremias, T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori Dan Isu*. Yogyakarta : Gaya Media.
- Wildavsky, Aaron dan Caiden, Naomi. 2012. *Dinamika Proses Politik Anggaran*. Yogyakarta. Universitas Proklamasi '45.

- Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Afan, Gaffar. 2009. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.